

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian suatu negara (Ali, 2006), sehingga harus ada peraturan dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* sehingga bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dan lebih cepat (Bank Indonesia, 2011). Dalam kegiatan operasionalnya, bank berhubungan dengan risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Linsey and Shirves (2006) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa risiko dapat dipandang dari dua sisi yakni positif dan negatif dalam menanggapi sejumlah peristiwa yang terjadi. Hal ini disebabkan adanya berbagai persepsi mengenai risiko, maka pemegang saham suatu perusahaan memerlukan informasi lebih lanjut melalui pengungkapan risiko untuk membuat keputusan dalam melakukan kegiatan bisnis serta berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Pengungkapan risiko perusahaan menjadi perhatian penting bagi masyarakat khususnya bagi investor. Hal ini dikarenakan informasi mengenai risiko perusahaan dibutuhkan oleh investor sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan sehingga investor dapat lebih cermat dan tepat dalam melakukan investasi. Oleh sebab itu, pengungkapan informasi risiko oleh

suatu perusahaan harus dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun juga termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko adalah *corporate governance*.

Pengertian *corporate governance* menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD, 2004) adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Lain halnya dengan penelitian Ho dan Wong (2001) yang mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan di mana transparansi merupakan indikator utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah perekonomian. Akan tetapi, tidak semua bank dapat menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Sebagai contoh ada beberapa kasus bank di Indonesia bermasalah akibat praktik yang tidak sehat serta mengesampingkan prinsip *corporate governance*. Kasus yang menjadi sorotan tersebut telah dirangkum dalam penelitian Suhardjanto, dkk., (2012).

Kasus pertama mengenai kredit macet yang menyebabkan Bak Summa mengalami likuidasi pada tahun 1992. Hal ini terjadi akibat pihak manajemen bank tidak terbuka atau tidak transparansi terhadap pemangku kepentingan. Penyebab lainnya ialah dewan komisaris selaku pengawas

pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kasus selanjutnya adalah mengenai skandal laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo. Hal ini disebabkan karena pihak bank tidak ingin mengungkapkan berapa besaran laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan tersebut. Kasus ini terungkap setelah pihak bank melaporkan tiga laporan keuangan per 30 September 2002 yang berbeda. Pertama, laporan keuangan diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002, kedua disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Desember 2002, dan ketiga disampaikan ke manajemen Bank Lippo pada tanggal 6 Januari 2003.

Dari kedua kasus tersebut, salah satu penyebab utamanya ialah kurangnya penerapan prinsip *corporate governance* pada perbankan di Indonesia. Penerapan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sebuah perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Ettredge, dkk. (2010) yang menemukan bukti bahwa *corporate governance* perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitian ini, *corporate governance* dijabarkan oleh lima variabel, yaitu ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan keberadaan komisaris wanita.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki peran yang cukup penting yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas dan kinerja bank serta sebagai penasehat direksi dalam memastikan bahwa

perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Oleh karena itu, jumlah dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres, dkk., 2005). Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan akan memunculkan perpaduan kemampuan antar anggotanya sehingga nantinya dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan termasuk pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitiannya, Saidah (2014) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun secara berkala. Dewan komisaris akan mengawasi jalannya perusahaan secara efektif apabila masing-masing anggota dewan secara aktif hadir dalam pertemuan antar dewan komisaris di dalamnya. Semakin tinggi frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003). Frekuensi rapat dapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan dengan lebih intensif, relevan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengungkapan risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen juga dapat mempengaruhi keefektifan peran pengawasan karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan

komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka (Wardhana, 2013). Seperti penelitian Baik, dkk. (2009) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase dewan independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi lebih luas. Menurut Ettredge, dkk. (2010) komisaris independen berpengaruh positif signifikan dalam kepatuhan pengungkapan informasi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 anggota yakni diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku prodesi dari luar perusahaan. Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan mengawasi kinerja manajemen. Penelitian Nasution dan Setiawan (2007); Li, dkk. (2008); Cety dan Suhardjanto (2010) menemukan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko. Menurut Ho dan Wong (2001) komite audit independen berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan.

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Wanita dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria (Kusumastuti, 2006). Penelitian serupa oleh Ntim, dkk. (2013), Allini,

dkk. (2016), dan Al-Maghzom, dkk. (2016) mengungkapkan bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Keberadaan wanita sebagai dewan komisaris dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis untuk pengungkapan risiko.

Penelitian serupa mengenai hubungan *corporate governance* dan pengungkapan risiko perusahaan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan variabel yang akan digunakan dan objek serta waktu pengamatan dilakukan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum banyak penelitian yang menggunakan proksi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan keberadaan komisaris wanita dalam menjelaskan *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko pada perbankan Indonesia yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan risiko dapat dimaksimalkan dengan adanya *corporate governance* yang direpresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan keberadaan komisaris wanita. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perbankan?

- b. Bagaimana pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perbankan?
- c. Bagaimana pengaruh komposisi komisaris independen terhadap pengungkapan risiko perbankan?
- d. Bagaimana pengaruh komposisi komite audit independen terhadap pengungkapan risiko perbankan?
- e. Bagaimana pengaruh keberadaan komisaris wanita terhadap pengungkapan risiko perbankan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perbankan.
- b. Menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perbankan.
- c. Menguji pengaruh komposisi komisaris independen terhadap pengungkapan risiko perbankan.
- d. Menguji pengaruh komposisi komite audit independen terhadap pengungkapan risiko perbankan.
- e. Menguji pengaruh keberadaan komisaris wanita terhadap pengungkapan risiko perbankan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara terinci, manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

##### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual kepada para peneliti yang melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan bahasan yang serupa, baik dijadikan sumber referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademis pembaca.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan atau dalam pengambilan keputusan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rencana isi tesis yang akan disusun sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis. Adapun rencana sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan tesis ini secara keseluruhan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang berisikan jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun rinciannya adalah deskripsi objek



penelitian, teori yang terkait, hasil penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis serta pernyataan hipotesis.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang menjelaskan rancangan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok masalah atau untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan. Adapun rinciannya terdiri dari penjabaran populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian dan pengujian hipotesis.

Bab keempat berisi tentang analisis data dan pembahasannya. Bab ini juga memuat analisis data yang tersedia, perangkat penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran, jawaban, serta hasil dari masalah yang diteliti.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini, implikasi serta saran mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan.

Daftar referensi dan lampiran berisikan semua sumber yang diacu dalam laporan tesis. Lampiran merupakan dokumen pendukung proses penelitian, misalnya dokumen yang dipandang perlu secara substansial dilampirkan.